





RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS SARI MULIA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

MATA KULIAH (MK)	KODE	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	HKU04	3	II (dua)	28Februari2020
OTORITAS	Dosen Pengembang RPS		Ketua Jurusan	
	 Fakhruddin Razy, SH., MH NIK. 1166012011041		 Fakhruddin Razy, SH., MH NIK. 1166012011041	
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) Catatan: (S) Sikap (KU) Keterampilan Umum (KK) Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	S1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius		
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika		
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
	S4	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		

(P) Pengetahuan	KU2	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
	KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat
	KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi hukum kepada masyarakat.
	KK3	Mampu memberikan penjelasan fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan.
	KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
	P1	Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan.
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
	CP Mata Kuliah	
	M1	Mahasiswa Mampu Memahami Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; Memahami hubungan antara HAN dengan HTN
	M2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil
	M3	Mahasiswa mampu memahami sumber kewenangan, cara memperoleh wewenang serta batasan
	M4	Mahasiswa memahami tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah
	M5	Mahasiswa memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan <i>Good Governnance</i>
	M6	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> , memahami, menjelaskan dan membedakan tentang Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> dan memahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi

	M7	Mahasiswa mampu Menjelaskan pengertian mengenai keputusan pemerintah yang bersifat <i>beschikking</i> , Memahami dan menjelaskan mengenai macam-macam serta syarat-syarat <i>beschikking</i> dan Memahami dan menjelaskan mengenai keberlakuan, perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan pemerintahan tersebut
	M8	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
	M9	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai birokrasi dan kebijakan publik, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang kebijakan publik, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mahasiswa mampu memahami pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, fungsi Hukum Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa/kelurahan serta berbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1	Pengertian HAN Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; Ruang Lingkup, Objek Kajian HAN,dan Hubungan HTN dan HAN
	2	Pengertian sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil
	3	Memahami sumber kewenangan, cara memperoleh wewenang serta batasan
	4	memahami tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah
	5	Memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan <i>Good Governance</i>
	6	Pengertian mengenai Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> , memahami, menjelaskan dan membedakan tentang Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> danmemahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi
	7	Pengertian mengenai keputusan pemerintah yang bersifat <i>beschikking</i> , Memahami dan menjelaskan mengenai macam-macam serta syarat-syarat <i>beschikking</i> dan Memahami dan menjelaskan mengenai keberlakuan, perubahan, pencabutan dan pembatalan keputusan pemerintahan tersebut
	8	Pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Penilaian		- UAS= 70 % - Penugasan = 30 %
Pustaka	Utama	Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty 1987
	Pendukung	1. Nugraha, Safri., dkk, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. 2. Hotma Sibuea P., <i>Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik</i> , Jakarta: Erlangga, 2010. 3. Utrecht, E. <i>Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia</i> , Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988.

Media Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak	Hardware/Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, Lcd/proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching	<ul style="list-style-type: none"> - Fakhrudin Razy, SH., MH (FR) - Yandi Saputera, SH., MH (YS) 	
Mata Kuliah Syarat	<ul style="list-style-type: none"> -PIH -PHI 	

Tabel Rincian Pembelajaran

Minggu Ke	Kemampuan akhir yg diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan bentuk penilaian	Bobot Penilaian	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1-2	Mahasiswa Mampu Memahami Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; Memahami hubungan antara HAN dengan HTN	Pengertian HAN Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Lingkup Pengertian Negara Hukum, sejarah, ciri-ciri, dan tipe-tipenya. • Peran Negara Hukum bagi Hukum Administrasi Negara; Objek Kajian HAN • Hubungan HTN dan HAN 	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 2x(3x50)'	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hukum Administrasi Negara melalui e-learning dan diskusi pada chat yang ada di e-learning	Ketepatan menjelaskan Pengertian HAN Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Tujuan Hukum Administrasi Negara; <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Lingkup Pengertian Negara Hukum, sejarah, ciri-ciri, dan tipe-tipenya. b. Peran Negara Hukum bagi Hukum Administrasi Negara; Objek Kajian HAN • Hubungan HTN dan HAN 	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Hasil rujukan • Membanding • Menjelaskan kan 	15%	FR
3-4	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan sumber hukum formil	Pengertian sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 2x(3x50)'	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hukum Administrasi Negara melalui e-	Ketepatan menjelaskan sumber hukum HAN macam-macam sumber hukum materiil dan macam-macam sumber hukum formil	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk non test: Presentasi • Diskusi 	15%	FR

	macam-macam sumber hukum formil				learning dan diskusi pada whatsapp				
5	Mahasiswa mampu memahami sumber kewenangan, cara memperoleh wewenang serta batasannya	Penjelasan mengenai Sumber kewenangan pemerintah cara memperoleh wewenang serta batasannya (<i>Studi kasus tentang lockdown kota</i>)	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 1x(3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hukum Administrasi Negara dalam studi kasus lockdown melalui e-learning dan diskusi pada whatsapp	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan sumber kewenangan, cara memperoleh wewenang serta batasan pemerintah dalam hal lockdown 	Kreteria: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian. Bentuk non test: <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan • diskusi 	10%	FR
6-7	Mahasiswa memahami tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah	Penjelasan mengenai tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah (Studi kasus pembatasan sosial berskala besar dan Darurat sipil)	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 2x(3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hukum Administrasi Negara dalam studi kasus PSBB melalui e-learning dan diskusi padawhatsapp	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dalam menjelaskan tindakan pemerintah serta macam-macam tindakan hukum pemerintah dalam rangka pembatasan sosial berskala besar 	Kreteria: Ketepatan, Kejelasan dan kesesuaian Bentuk non tes: Ringkasan diskusi	10%	FR
8-9	Mahasiswa Memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan <i>Good Governnace</i>	Memahami konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan <i>Good Governnace</i>	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 2x(3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hukum Administrasi Negara melalui e-learning dan diskusi pada zoom	Ketepatan dalam menjelaskan konsep AUPB serta hubungan AUPB dengan <i>Good Governnace</i>	Kriteria: Ketepatan , Kejelasan dan kesesuaian Bentuk non test; <ul style="list-style-type: none"> •Ringkasan •Menjelaskan •Membandingkan 	10%	YS
10	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> , memahami, menjelaskan dan membedakan	Penjelasan mengenai Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> , memahami, menjelaskan dan membedakan tentang Diskresi dengan <i>freies</i>	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 1x(3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hukum Administrasi Negara melalui e-	Ketepatan dalam menjelaskan pengertian mengenai Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> , memahami, menjelaskan dan membedakan tentang	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi 	10%	YS

	tentang Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> dan memahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi	<i>Ermessen</i> dan memahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi			learning dan diskusi pada whatsapp	Diskresi dengan <i>freies Ermessen</i> dan memahami dan menjelaskan mengenai batasan dalam penggunaan Diskresi	• Diskusi		
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	Pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 2x(3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hukum Administrasi Negara melalui e-learning dan diskusi pada aplikasi zoom	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. dan memahami, menjelaskan dan membedakan tentang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	Kreteri: Ketepatan, kejelasan dan kesesuaian Bentuk non-test <ul style="list-style-type: none"> • Resume hasil Rujukan • Menjelaskan • Menanggapi 	15%	YS
13-14	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian mengenai birokrasi dan kebijakan publik, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang kebijakan publik, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.	Pengertian Birokrasi dan kebijakan publik Pengertian Birokrasi pemerintah, kebijakan Publik, Manajemen pemerintahan. dan Pelayanan Publik	Kuliah e-learning (Daring) & Diskusi	(TM: 2x(3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hukum Administrasi Negara melalui e-learning dan diskusi pada whatsapp	Ketepatan menjelaskan pengertian mengenai birokrasi dan kebijakan publik, memahami, menjelaskan dan membedakan tentang kebijakan publik, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.	Kreteri: ketepatan, kesesuaian, dan kejelasan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Resume hasil • Menjelaskan 	15%	YS

Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa Mahasiswa membuat kajian dalam bentuk Template apa yang dimaksud dengan PSBB serta memberikan pemikiran apa saja yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka PSBB di berlakukan



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS SARI MULIA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH Hukum Administrasi Negara

KODE MK HKU04 **SKS : 3** **SEMESTER : II**

DOSEN PENGAMPU

BENTUK TUGAS

JUDUL TUGAS

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

DESKRIPSI TUGAS

METODE Pengerjaan Tugas

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN

JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan	:	Tanggal
Kegiatan	:	Tanggal
Kegiatan	:	Tanggal
Kegiatan	:	Tanggal
Kegiatan	:	Tanggal

LAIN-LAIN

DAFTAR RUJUKAN